

**PERUBAHAN BUDAYA PETANI TEPIAN HUTAN DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS MODAL SOSIAL  
*CULTURAL CHANGES OF FOREST OUTSKIRT PEASANTS IN THE DEVELOPMENT OF  
FOREST RESOURCES MANAGEMENT BASED ON SOCIAL CAPITAL***

Oleh:

Imam Santoso

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Jl. H.R. Bunyamin Grendeng Purwokerto Telp. (0281) 635292 ps. 214

(Diterima: 20 Oktober 2006; disetujui: 15 Januari 2007)

**ABSTRACT**

The research' s result showed that there was differences between peasants with and without social capital in relation to its social and economic characteristics in forest resources management. The differences affected forest outskirts peasant behavior in utilizing forest resources. Peasants cultural changes in term of forest handling had been gradually happened evolutionarily. Peasants who have strong social capital tended to pay attention on forest conservation, but in contrast, peasant who has experienced social capital breakdown tended not to pay attention on forest resources degradation. The result implied that the transformation of peasants behaviour went from lower to higher social capital through analysis for formulating integration model of social capital growth on forest outskirts peasants in the effort of forest resources management.

Key words: Cultural changes of forest outskirts peasants, Forest resources

**PENDAHULUAN**

Persoalan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia sampai saat ini belum juga terselesaikan. Permasalahan ini diyakini berawal dari sistem pengelolaan hutan yang terpusat, monopoli, dan menegasikan eksistensi komunitas lokal, yang dikenal sebagai masyarakat tepian hutan. Orientasi pemanfaatan hutan yang ditekankan pada perolehan fresh money mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, khususnya kerusakan hutan.

Laporan Perum Perhutani tahun 2004 menunjukkan bahwa sejak tahun 1985–2000, kerusakan hutan produksi di Pulau Jawa mencapai 350.000 hektar. Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2001 menyebutkan dalam 50 tahun terakhir, Indonesia kehilangan hutan seluas 60 juta hektar (Atje dan Roesad, 2001).

Dampak lain adalah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan konflik dalam pengelolaan hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Ragam kekayaan alam pada hutan semakin tidak memberi jaminan bagi sumber kehidupan masyarakat lokal. Hasil penelitian Santoso (2000) dan Aliadi et al. (2002) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong miskin ternyata paling banyak ditemukan justru di pedesaan tepian hutan dan sekitar pantai. Padahal kedua tipe pedesaan ini diketahui menyimpan aneka jenis kekayaan sumberdaya alam yang melimpah.

Masyarakat petani tepian hutan menghadapi ragam tekanan sosial dan ekonomi yang menghimpit kehidupan mereka, termasuk dalam keterbatasan mengelola usahatani di lahan sekitar hutan. Manfaat hutan baik sebagai

maupun sebagai penata hidroorologis disertai keragaman hayati (intangible) semakin tidak terjangkau masyarakat petani tepian hutan. Kesempatan mereka mengelola hutan makin terbatas. Meskipun ada peluang, statusnya hanya sebagai buruh tani hutan pada pengelola perusahaan hutan komersil. Oleh karena itu, berbagai pihak yang berkompeten perlu segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketidakberdayaan petani di pedesaan tepian hutan.

Seiring dengan menipisnya kesempatan petani memanfaatkan hutan untuk kepentingan usahatani secara berkelanjutan, mendorong perilaku mereka menjadi kurang peduli terhadap kaidah konservasi lahan dan air. Intensitas bertani yang semakin menurun me-munculkan masalah terhadap etika subsistensi kaum petani, yakni berupa penurunan hasil produksi yang dipetik setiap panen tiba dan memperlemah daya hidup mereka. Sesuatu yang lebih sukar lagi dielakkan adalah kenya-taan sosial yang dihasilkan oleh tekanan intervensi kuat dari berbagai pihak, termasuk penetrasi pasar secara perlahan, ikut mengubah budaya petani tepian hutan. Budaya masyara-kat petani desa yang semula menjunjung nilai keluhuran adat tradisi terhadap lingkungan alam disertai ikatan kebersamaan akhirnya memudar akibat desakan faktor ekonomi dari pengaruh budaya industri yang bersifat pengomersialan.

Salah satu orientasi nilai budaya masyarakat petani tepian hutan yang rawan berubah adalah modal sosial. Sedikit demi sedikit elemen modal sosial yang dimiliki masyarakat petani tepian hutan terkikis, tanpa sempat ditata dan diberi kreasi untuk mampu bertahan menopang rasa tanggungjawab dan rasa memiliki

warga petani terhadap hutan, sebagai salah satu aset bagi kehidupan bersama. Padahal, modal sosial merupakan prasyarat utama melakukan tindakan bersama dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tetap berpegang pada ragam elemen pokok, seperti yang diutarakan Pretty and Ward (1999), bahwa elemen pokok dari modal sosial mencakup: saling percaya, jaringan sosial kolektif, dan pranata yang mengandung nilai, norma, sanksi, dan aturan, yang berfungsi sebagai pelumas ampuh melicinkan hubungan kehidupan sosial.

Secara khas, hasil orientasi lapangan Santoso (2004) mengungkapkan bahwa pada masyarakat yang masih memelihara elemen modal sosial di pedesaan tepian hutan, baik tipe adat, rakyat maupun negara, cenderung lebih konsisten untuk memelihara sumberdaya hutan daripada masyarakat yang telah mengalami pemudaran nilai dan norma modal sosial. Beberapa elemen modal sosial yang dikem-bangkan masyarakat untuk mendukung perilaku mereka agar tidak ikut merusak hutan antara lain: kepercayaan, toleransi, hubungan timbal balik, tanggungjawab, orientasi kepentingan bersama, menghargai komitmen, kekuatan ikatan kekerabatan, ikatan emosional sedesa, nilai kebersamaan, kebersamaan memi-likhi hutan, dan solidaritas yang tinggi. Adapun masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial akan menyebabkan jalinan ikatan kebersamaan antarsesama mereka merenggang, termasuk berkurangnya komitmen menjaga sumberdaya hutan dari berbagai bentuk kerusakan. Fenomena yang demikian secara nyata dapat teramati jelas pada masyarakat desa yang sudah dipengaruhi nilai budaya industri.

mereka dalam memanfaatkan hasil hutan, merupakan suatu kenyataan sosial yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian karena memiliki nilai kepentingan dan kenyataan dengan upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan, khususnya dari keberadaan petani tepian hutan sebagai komunitas lokal. Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi dari hasil kajian terhadap (1) identifikasi ciri sosial ekonomi antara petani yang berbasis dan yang tidak atau kurang berbasis modal sosial dan (2) perubahan budaya petani tepian hutan dalam pengelolaan hutan berbasis modal sosial.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja di pedesaan dengan tiga tipe hutan: hutan rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan hutan adat di Kabupaten Mandailing Natal (Propinsi Sumatera Utara) serta hutan negara di Kabupaten Banyumas (Propinsi Jawa Tengah). Waktu penelitian berlangsung enam bulan mulai September 2003 sampai Pebruari 2004. Penelitian ini bagian dari pendalaman data menyeluruh untuk kepentingan penyusunan disertasi yang selesai diujikan Mei 2004.

Rancangan penelitian adalah gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model gabungan berpedoman pada dominant less-dominant design (Cresswell, 1994). Artinya, pendekatan kualitatif lebih dominan (qualitative dominant) daripada pendekatan kuantitatif (quantitative less dominant).

Populasi penelitian mencakup semua petani yang bermukim di pedesaan tepian hutan pada tiga kabupaten yang diteliti. Mengingat pendekatan penelitian yang dominan dimanfaatkan adalah pendekatan kualitatif, maka teknik penentuan informan dilakukan secara purposif berdasarkan syarat: pengelolaan sumberdaya hutan, pemilikan modal sosial, usahatani, lokasi mukim, dan kesediaan memberikan informasi sesuai dengan tema penelitian. Sementara, untuk kepentingan pendekatan kuantitatif ditetapkan responden dengan teknik gugus bertahap (multistage sampling), sesuai yang disyaratkan Cochran (1977). Jumlah responden dari tiap tipe hutan sebanyak 75 orang, sehingga total responden 225 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer yang bersumber dari responden dikumpulkan dengan teknik wawancara memakai kuesioner terstruktur. Pengumpulan data primer bersifat kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan life history. Teknik pengumpulan primer lainnya adalah pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian hasil penelitian ahli terdahulu, dokumen resmi, arsip, dan catatan terkait tema.

Teknik pengolahan dan analisis data dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dengan interaktif model of analysis, sedangkan teknik kuantitatif dilakukan dengan Uji beda vektor nilai tengah ( $T^2$  Hotelling) untuk menentukan ada tidaknya perbedaan ciri antara petani yang mengelola sumberdaya hutan

Tabel 1. Data yang Diolah dengan T<sup>2</sup> Hotelling

Pengamatan	Peubah (X <sub>01</sub> X <sub>02</sub> X <sub>03</sub> X <sub>04</sub> X <sub>05</sub> X <sub>06</sub> X <sub>07</sub> )	Kelompok
1		Kelompok: G <sub>1</sub>
.		(Berbasis Modal Sosial)
η <sub>1</sub>		Kelompok: G <sub>2</sub>
1		(Kurang Berbasis Modal Sosial)
.		
η <sub>2</sub>		

Keterangan: X<sub>01</sub> = Luas lahan pertanian (hektar)

X<sub>02</sub> = Pemakaian teknologi pertanian (tingkatan)

X<sub>03</sub> = Lama pengalaman bertani (tahun)

X<sub>04</sub> = Umur (tahun)

X<sub>05</sub> = Tingkat produktivitas (ton/hektar/panen)

X<sub>06</sub> = Lama pendidikan formal (tahun)

X<sub>07</sub> = Tingkat pendidikan tak-formal (kali/bulan)

G<sub>1</sub> = Responden yang mengelola hutan berbasis modal sosial

G<sub>2</sub> = Responden yang mengelola hutan kurang berbasis modal sosial

η<sub>1</sub> = Banyaknya pengamatan pada kelompok G<sub>1</sub>

η<sub>2</sub> = Banyaknya pengamatan pada kelompok G<sub>2</sub>

Perhitungan uji statistika T<sup>2</sup> Hotelling adalah:

$$T^2 = \frac{\eta_1 \eta_2}{\eta_1 + \eta_2} (X_1 - X_2) S^{-1} (X_1 - X_2) \dots\dots\dots (1)$$

Perbedaan antarkelompok diketahui dari uji F dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{\eta_1 + \eta_2 - \rho - 1}{\rho(\eta_1 + \eta_2 - 2)} T^2, \text{ dengan derajat}$$

bebas (ρ, η<sub>1</sub> + η<sub>2</sub> - ρ - 1)

Keterangan:

S<sup>-1</sup> = Invers matriks koragam

ρ = Banyaknya peubah yang diamati

η<sub>1</sub> = Ukuran sampel pada kelompok G<sub>1</sub>

η<sub>2</sub> = Ukuran sampel pada kelompok G<sub>2</sub>

x<sub>1</sub> = Vektor rata-rata kelompok 1 (G<sub>1</sub>)

x<sub>2</sub> = Vektor rata-rata kelompok 2 (G<sub>2</sub>)

Apabila F<sub>hitung</sub> > dari F<sub>tabel</sub>

(ρ, η<sub>1</sub> + η<sub>2</sub> - ρ - 1) di mana α = 0,05, menyatakan bahwa ada perbedaan ciri antara petani yang mengelola sumberdaya hutan dengan berbasis modal sosial dengan yang kurang berbasis modal sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ciri Sosial Ekonomi Petani Tepian Hutan

Petani di pedesaan tepian hutan di tiga kabupaten yang diteliti mempunyai kesamaan ciri khas, yakni kelangsungan kehidupannya sangat tergantung pada eksistensi sumberdaya hutan melalui ragam bentuk aktivitas pengelolaan yang dilakukan. Bagi petani tepian hutan, keberadaan hutan bukan hanya sebatas sumber ekonomi saja, namun lebih jauh juga berfungsi sebagai jaminan ketahanan pangan (food security) dan pemberi corak atas aspek pengelolaan sistem pertanian, perburuan yang saling berinteraksi dengan aspek kebudayaan dan religius untuk membangun struktur kehidupan utuh. Ciri luas lahan cenderung menyempit khususnya akibat sistem waris berbagi yang dianut (Wolf, 1985).

Sistem bertani dominan tradisional ditunjukkan dengan masih jarang petani mengadopsi inovasi baru untuk peningkatan produksi usahatannya. Moral ekonomi petani tepian hutan mayoritas berada pada ambang batas etika subsisten dengan berprinsip 'dahulukan selamat' sesuai yang diungkapkan Scott (1989).

Saat mengalami keterdesakan ekonomi mendorong petani menjual hasil panen dengan harga berapapun (rendah). Ciri petani baik di tepian hutan rakyat, hutan adat maupun hutan negara menunjukkan kebenaran ciri serupa dengan petani Indonesia pada umumnya, seperti disebutkan Margono (2001), bahwa mereka memiliki

Tabel 2. Distribusi Perbedaan Ciri Sosial Ekonomi Petani Tepian Hutan

Jenis Ciri Sosial Ekonomi	Hutan Rakyat*)		Hutan Adat*)		Hutan Negara*)		Total Responden (orang)
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	
Pemilikan luas lahan pertanian (hektar)							
• Sempit	42	56,0	5	6,0	48	64,0	95
• Sedang	23	30,6	54	72,0	19	25,3	96
• Luas	10	13,3	16	21,3	8	10,7	34
Pemakaian teknologi pertanian (tingkatan)							
• Tradisional	62	82,6	68	90,6	49	65,3	179
• Semi tradisional–modern	13	17,3	7	9,3	22	29,3	42
• Modern	–	–	–	–	4	5,0	4
Lama pengalaman bertani (tahun)							
• Baru	6	8,0	3	6,0	17	22,7	26
• Sedang	20	26,6	13	17,3	35	46,7	50
• Lama	49	65,3	59	78,7	24	32,0	132
Umur (tahun)							
• Muda	16	21,3	3	4,0	2	2,6	21
• Sedang	27	36,0	40	53,3	53	70,7	120
• Tua	22	29,3	32	42,7	20	26,7	74
Tingkat produktivitas (ton/hektar/panen)							
• Rendah	46	61,3	12	16,0	31	41,3	89
• Sedang	29	38,7	63	84,0	39	52,0	131
• Tinggi	–	–	–	–	5	6,7	5
Lama pendidikan formal (tahun)							
• Rendah	47	62,7	54	72,0	59	78,7	160
• Sedang	28	37,3	21	28,0	26	34,7	75
Tingkat pendidikan tak–formal (kali/bulan)							
• Rendah	52	69,3	43	57,3	23	30,7	118
• Sedang	23	30,6	32	42,7	36	48,0	91
• Tinggi	–	–	–	–	16	21,3	16

Keterangan: \* berarti jumlah responden 75 orang.

kebutuhan pokok. Ciri demikian berakibat luas terhadap tingkat kemampuan petani dalam menerapkan teknologi untuk mengelola usaha-taninya, termasuk sumberdaya hutan.

Pengamatan dari sisi budaya petani mengelola sumberdaya hutan menunjukkan bahwa petani di tepian hutan adat, hutan rakyat, dan hutan negara yang masih memelihara modal sosial, memiliki ciri sosial ekonomi yang baik. Rincian informasi perbedaan ciri sosial ekonomi petani tepian hutan, sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis modal sosial dan kurang berbasis modal sosial, tercermati pada Tabel 2.

Tingkat kerusakan hutan sangat rendah pada kelompok tani yang memelihara modal sosial dalam kehidupannya; bahkan untuk petani di pedesaan bertipe hutan adat (TH AKMS) dengan modal sosial yang dimiliki warga berupaya menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Kenyataan ini berbeda dengan petani di

tepi hutan yang mengalami pemudaran modal sosial yang kondisi kerusakan sumberdaya hutan sukar terhindari. Informasi terinci tentang perbedaan tingkat kerusakan hutan, sehubungan dengan sebaran petani dalam pengelolaan sumberdaya hutan berbasis modal sosial dan yang kurang berbasis modal sosial, teramat melalui Tabel 3.

Berdasarkan analisis uji beda vektor nilai tengah ( $T^2$  Hotelling), untuk menentukan ada tidaknya perbedaan ciri antara petani yang mengelola sumberdaya hutan berbasis dan yang kurang berbasis modal sosial, ternyata terdapat perbedaan nyata antara kedua kelompok petani itu. Petani berbasis modal sosial memiliki ciri sosial ekonomi lebih kondusif dan sebaliknya, sebagaimana terungkap dalam Tabel 2.

Penuturan informan yang berinisial T (42 tahun) dari pedesaan bertipe hutan adat menyatakan, sesama warga petani di desanya saling percaya

Tabel 3. Sebaran Petani dalam Kelompok menurut Kategori Pemilikan Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Tipe Hutan	Kode Sandi Wilayah	Tingkat Kerusakan Hutan	Jumlah Petani menurut Kategori Modal Sosial				Jumlah Responden
			Kurang Berbasis Modal Sosial		Berbasis Modal Sosial		
			Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	
Hutan Rakyat	TH KBS	Tidak Parah	38	36,1	37	28,4	75
	TH KSO	Kurang Parah	52	26,4	24	45,7	75
	TH KS	Parah	54	37,5	21	25,9	75
Jumlah			144	100,0	81	100,0	225
Hutan Adat	TH AKMS	Tidak Parah	7	20,0	68	36,0	75
	TH AKN	Kurang Parah	12	34,3	63	33,0	75
	TH AKSI	Parah	16	45,7	59	31,0	75
Jumlah			35	100,0	190	100,0	225
Hutan Negara	TH NKSB	Tidak Parah	47	26,7	38	64,4	75
	TH NKP5	Kurang Parah	63	35,8	12	20,3	75
	TH NKAB	Parah	66	37,5	9	15,3	75
Jumlah			176	100,0	59	100,0	225



belukar untuk lahan baru pertanian, berburu binatang yang hidup di hutan, mengotori sungai yang mengalir dari hutan dengan polutan (deterjen, sabun, pupuk ataupun pestisida), membuat rumah tinggal di hutan, masuknya pihak pemegang HPH untuk memanfaatkan hasil hutan, dan pencurian kayu atau jenis tanaman langka lainnya dari dalam hutan Pekantan. Hutan bagi mereka merupakan bagian penting dari alam yang harus dijaga bersama karena mempunyai nilai kesakralan yang diakui turut menjaga proses keseimbangan alam yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup warga. Kutipan dari penjelasan T tentang larangan merusak hutan bagi warga Desa Pekantan adalah:

“Ise pe halak na na manyega harangan... manabai batang ni tanoman, mambakar balukar, manyega-nyega sude isi ni harangan pasti mandapot balasan sian Allah. Ima parjanjian ni ompu halak na jolo ankon rap dijaga do sude isi di harangan on. Ulang ro bala bencana tu hami. Pantang godang manabai batang ni bania na marumur puluhan sampai ratusan tahun bope sanga na asing nai... Mabiari do sude melanggar larangan i harana percaya do hami anggo sega harangan sega ma ngolu ni sude makhluk termasuk jolma.”

Artinya:

“Siapa pun orangnya yang merusak hutan... Memotong kayu dan tanaman lain, membakari semak belukar, merusak semua isi hutan pasti akan mendapat hukuman dari Allah. Itulah perjanjian dari nenek moyang kami yang selalu mengingatkan harus bersama-sama menjaga semua sumberdaya hutan. Menjaga hutan adalah hal penting karena bila hutan sampai rusak diyakini masyarakat desa akan kedatangan bala bencana hebat. Menebangi pohon misalnya bania yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun di hutan

adalah suatu pantangan besar yang tak boleh dilanggar siapapun takut karena percaya jika hutan rusak maka kehidupan semua makhluk ikut rusak termasuk manusia.”

Berpijak pada keterangan informan di atas, menyiratkan kehidupan yang masih lekat memegang kearifan lokal dan modal sosial yang tidak merusak hutan, tetapi justru hidup sejalan dengan ritme dan harmoni alam. Sehubungan dengan temuan ini, Putnam (1993) menegaskan bahwa kerjasama sukarela lebih mudah terjadi pada suatu komunitas, yang memiliki modal sosial dalam bentuk sehimpun-an aturan dan pertukaran timbal balik serta pengikatan jaringan kesepakatan antarwarga. Lebih jauh Fukuyama (1995) menuturkan kembali, bahwa modal sosial yang bersarikan kepercayaan (trust) merupakan suatu dimensi budaya dari proses kehidupan ekonomi. Biasanya kehidupan ekonomi yang tidak dimasuki kearifan dan etika lingkungan inilah yang merupakan kondisi kritis dan awal dari kerusakan lingkungan. Lain sekali halnya dengan kondisi sosial yang ditemukan pada kalangan warga petani tepian hutan di pedesaan Ajibarang, Banyumas. Ketergantungan mereka terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan sangat tinggi dan relatif kurang mempunyai perilaku terkendali dalam menebangi kayu, yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan pihak Perhutani Banyumas Barat selaku pemangku hutan. Seorang informan yang bernama samaran Yono (44 tahun) mengungkapkan pendapatnya terhadap situasi warga petani yang kurang kompak untuk bersama menjaga sumberdaya hutan. Sebagian dari penuturan Yono tercermati dari pernyataan berikut.

upahi nebang kajeng sae kagem kepentingan Perhutani punapa tiyang sanes ingkang mboten pun kenal pundi asalipun.”

Artinya:

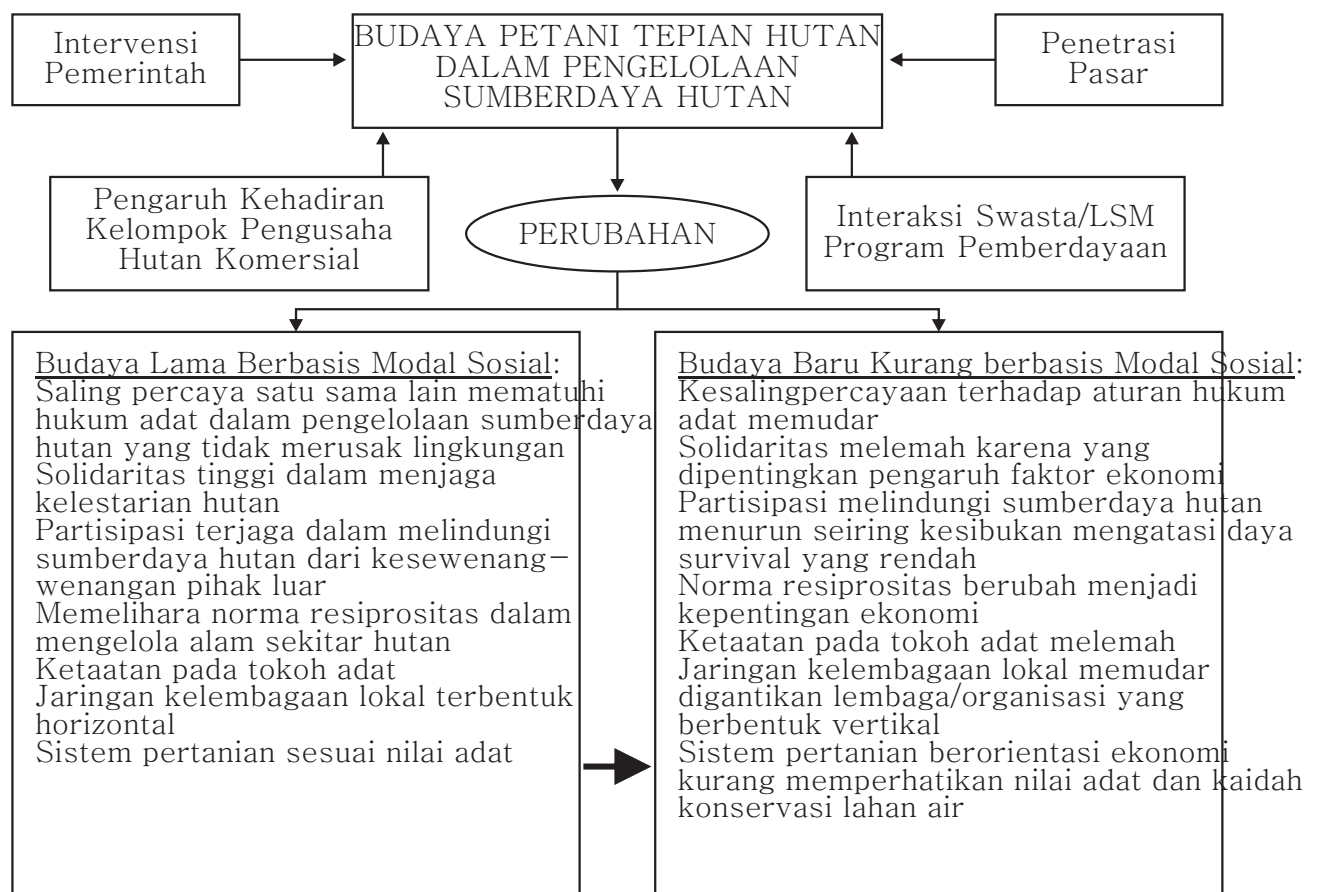
“Sampai sekarang petani juga sibuk sekali mencari tambahan pendapatan lain. Tidak sempat memikirkan untuk ikut bersama menjaga kelestarian sumberdaya hutan, karena perlu uang untuk membeli beras, menyebabkan beberapa petani bersedia ikut diupah untuk menebangi kayu baik atas izin Perhutani maupun atas permintaan orang lain yang sering tidak dikenali asalnya.”

### Perubahan Budaya Petani Tepian Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Kekuatan kelembagaan lokal yang semakin memudar telah membuat petani tidak mempunyai kekuatan untuk

beradaptasi dengan baik dalam keluar dari kerawanan di saat subsistensi mereka terganggu (Muhtaman, 2002). Kecenderungan demikian menyebabkan semua pihak, termasuk petani tepian hutan, menggantungkan harapannya pada eksploitasi sumberdaya alam berlebih tanpa menghiraukan konservasi. Perubahan budaya petani tepian hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan teramati berlangsung secara evolutif. Pada Gambar 1, teramati jelas gerak perubahan budaya pada masyarakat petani tepian hutan di tiga lokasi penelitian.

Berpijak pada kecenderungan di Gambar 1, terungkap bahwa budaya baru yang berkembang kurang berbasis modal sosial, yang antara lain teramati



Gambar 1. Perubahan budaya petani tepian hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan berbasis modal sosial.



aturan hukum adat, melemahnya solidaritas, daya hidup yang kurang peduli terhadap kon-servasi, dan penekanan menonjol dalam aspek ekonomi. Hal tersebut diiringi juga dengan melemahnya jaringan kelembagaan lokal yang digantikan lembaga/organisasi berbentuk vertikal dan sistem pertanian menjadi terlalu berorientasi ekonomi, sehingga kurang mem-perhatikan nilai adat dan kaidah konservasi lahan air.

Eksplorasi sumberdaya hutan telah merambah ke mana-mana. Selain alasan ekonomi atas kenaikan jumlah penduduk, juga memberikan sumbangan relatif besar terhadap kerusakan hutan. Masalah peningkatan jumlah penduduk yang 'tengah lapar dan menghadapi kesukaran ekonomi' kemudian menggantung-kan sumber nafkah pokok kepada aktivitas pemanfaatan flora dan fauna yang terkandung dalam kekayaan alam hutan secara illegal masih belum juga teratasi. Meskipun demikian, ada beberapa daerah tertentu yang memiliki kekuatan kelembagaan lokal dengan modal sosial yang masih bertahan tanpa banyak dipengaruhi oleh krisis tetap berpegang pada keyakinan tidak boleh merusak hutan. Hasil orientasi lapangan Santoso (2002) menunjukkan, masih ada beberapa kelompok petani hutan di Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki ketahanan terhadap penetrasi pasar dan gejolak pengaruh industri, yang membawa budaya hedonis dan konsumtif berbau pengomersialan. Hanya saja jenis komunitas petani ini sudah semakin langka ditemukan di pedesaan tepian hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang demikian akan sukar mengurangi kecenderung-an kerusakan hutan, sehingga tidak kondusif bagi

pengembalian berbagai fungsi hutan dan pemberdayaan masyarakat. Penurunan hutan semakin menghimpit dan social recovery semakin terhambat. Hal ini menguatkan adagium ekologi, bahwa kerusakan ekologi selalu berpotensi untuk membuka kemiskinan dan selanjutnya menyebabkan penurunan lingkungan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengelolaan hutan,— di tengah krisis ekologis seperti ini,— dan penyelamatan hutan tidak akan berhasil dengan baik tanpa penye-lamatan manusia di belakang hutan. Gabungan antara konservasi hutan sudah selayaknya diimbangi dengan social recovery berupa pem-berdayaan petani berbasis modal sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan Pretty and Ward (1999), yang menyebut modal sosial sebagai “the cohesiveness of people in their societies, and comprises relations of trust, reciprocity and exchange between individuals that lubricate cooperation; the bundles of common rules, norms and sanctions mutually agreed or handed-down; and connectedness, networks and groups” , semakin menunjukkan kekuatan. Hal yang perlu diperhatikan, yaitu membangun kembali modal sosial di era krisis multidimensi bukan hal mudah. Namun, upaya untuk memulai kembali dengan membangkitkan kesadaran bersama sudah sepantasnya penting dan terus diupayakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemu-kan bahwa ciri sosial ekonomi pada kelompok petani tepian hutan yang mengelola sumber-daya hutan berbasis modal sosial berbeda dengan petani yang kurang berbasis modal sosial. Secara jelas diketahui bahwa

pemudaran modal sosial sosial, yang selama ini menjadi investasi bersama dan menjadi perangsang terjadinya kerjasama yang ber-kesinambungan di antara sesama petani tepian hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliadi, A., D.W. Munggoro, dan W.A. Djatmiko. 2002. Prasyarat Pembaharuan Sistem Kehutanan Nasional. Pustaka Latin, Bogor.
- Atje, R. and K. Roesad. 2001. Who Should Own the Forests in Indonesia? Exploring the Links Between Economic Incentive Regimes, Property Rights and Forest Management. Forestry Policy Research Working Paper, CSIS, Jakarta.
- Cochran, W.C. 1977. Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York.
- Cresswell, J.W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. Thousand Oaks. Sage Publication, London.
- Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. The Free Press, New York.
- Margono, S. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah. Makalah yang disajikan dalam Seminar Perhiptani tahun 2001. Tasikmalaya.
- Muhtaman, D.R. 2002. Komuniti Forestri (KF) di Tengah Gempuran Globalisasi. Seri Kajian Komuniti Forestri. Pustaka Latin, Bogor.
- Pretty, J. and H. Ward. 1999. Social Capital and the Environment. Paper Submitted to World Bank, USA.
- Putnam, R.D. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton.
- Santoso, I. 2000. Pengembangan Program Agroforestry untuk Pemberdayaan Masyarakat Petani Tepian Hutan di KPH Banyumas Barat. Laporan Penelitian. Fisip Unsoed, Purwokerto.
- \_\_\_\_\_. 2002. Perilaku Adaptif Masyarakat Tepian Hutan di Kabupaten Mandailing Natal. Draft Awal Orientasi Lapangan. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- \_\_\_\_\_. 2004. Pemberdayaan Petani Tepian Hutan Melalui Pembaharuan Perilaku Adaptif. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Scott, J.C. 1989. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Wolf, E.R. 1985. Petani. Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES), Jakarta.